



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61 tahun 2010);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Mei 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 45
Tanggal : 1 Mei 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
A	INFORMASI PROFIL DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN							
1	Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap	Memuat informasi lengkap kedudukan/domisili Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah meliputi alamat, domain website, media sosial dan kontak lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website
2	Visi dan Misi	Visi Misi dan Program Gubernur Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Awal tahun RPJMD	Softfile	5 tahun	Website
3	Tugas dan Fungsi	Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website
4	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah						
5	Profil Pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Berisi daftar nama pejabat yang menjabat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website
6	Data Pegawai/Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website
7	Maklumat Pelayanan	Pernyataan tertulis terkait pemenuhan standar pelayanan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website
8	LHKPN/LHKASN	Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara yang dicetak melalui e-LHKPN/ telah diverifikasi oleh KPK	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Awal tahun	Softfile	3 tahun	Website
B INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
1	Nama Program dan Kegiatan	Daftar nama program dan kegiatan yang dilaksanakan	Kasubbag Program	Sub Bagian Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
2	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Nama penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan	Kasubbag Program	Sub Bagian Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
3	Target dan Capaian Program/Kegiatan	Hasil target dan capaian pelaksanaan program/kegiatan	Kasubbag Program	Sub Bagian Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
4	Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan	Rencana pelaksanaan program/kegiatan yang diuraikan	Kasubbag Program	Sub Bagian Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
5	Nilai Anggaran Program dan Kegiatan	Jumlah anggaran dan sumber anggaran	Kasubbag Program	Sub Bagian Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
C INFORMASI TENTANG KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
1	Ringkasan Informasi Kinerja	Progres target dan realisasi pelaksanaan kegiatan	Kasubbag Program	Sub Bagian Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi SKDP	Kasubbag Program	Sub Bagian Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
D INFORMASI TENTANG LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
1	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Berisi Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Ekuitas, Laporan Realisasi APBD	Kepala Dinas	Kasubbag Keuangan	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Website
2	Dokumen Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan	Rincian RKA dan DPA	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Website
3	Daftar Aset dan Inventarisasi	Laporan aset dan inventaris yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peternakan						
E INFORMASI TENTANG LAPORAN AKSES INFORMASI								
1	Register Permohonan Informasi Publik	Berisi jumlah permintaan informasi publik yang diterima beserta waktu pemenuhan informasi publik, jumlah informasi yang dikabulkan atau ditolak serta alasan penolakannya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	3 tahun	Website
F INFORMASI TENTANG PERATURAN KEPUTUSAN/KEBIJAKAN YANG MENGIKAT DAN/ATAU BERDAMPAK BAGI PUBLIK								
1	Rancangan Regulasi Sektor Pertanian dan sub- sektor Peternakan	Berisi rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sekretaris	Sekretaris	Tentatif	Softfile	1 tahun	Website dan Arsip
2	Regulasi Sub-Sektor Pertanian dan Peternakan	Berisi peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau diletakkan	Sekretaris	Sekretaris	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website dan Arsip
G INFORMASI TENTANG PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI								
1	SOP Permohonan Informasi Publik	Berisi tata cara mengenai permohonan informasi publik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
2	SOP Pengelola Keberatan	Berisi tata cara mengenai keberatan informasi publik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
3	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	Berisi tata cara mengenai penanganan sengketa informasi publik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
4	SOP Alur Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik yang Akan Disampaikan ke Publik	Berisi tata cara petugas dalam mengelola dan mengolah keakuratan informasi sebelum disampaikan kepada publik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
H INFORMASI TENTANG CARA PENGADUAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG								
1	SOP Penanganan Pengaduan	Berisi tata cara mengenai penanganan pengaduan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
2	Whistle Blowing System	Berisi tata cara mengenai penanganan pengaduan melalui whistle blowing system	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
I INFORMASI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
1	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Berisi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
2	Pemilihan Pengadaan	Berisi dokumen terkait tahap	Kepala Dinas	KPA/PPK	Setelah tahap	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Barang dan Jasa	pemilihan pengadaan barang dan jasa 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan Kontrak 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Jadwal pelaksanaan dan lokasi pekerjaan 9. Gambar Rancangan pekerjaan 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 11. Dokumen Penawaran Administratif 12. Surat Penawaran Penyedia 13. Sertifikat atau Lisensi Resmi Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi			pemilihan telah dilaksanakan			

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 20. Surat Perjanjian Kemitraan 21. Surat Perjanjian Swakelola 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola 23. Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>						
3	Pelaksanaan Barang dan Jasa	Berisi dokumen terkait tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 1. Dokumen Kontrak 2. Ringkasan Kontrak 3. Surat Perintah Mulai Kerja 4. Surat Jaminan Pelaksanaan 5. Surat Jaminan Uang Muka 6. Surat Jaminan Pemeliharaan 7. Surat Tagihan 8. Surat Pesanan e-Purchasing 9. Surat Perintah Membayar 10. Surat Perintah Pencairan Dana 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan	Kepala Dinas	KPA/PPK	Akhir tahap pelaksanaan	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 14. Berita Acara Serah Terima Sementara 15. Berita Acara Serah Terima						
INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT								
A	DAFTAR INFORMASI PUBLIK							
1	DIP	Berisi daftar informasi publik	Kepala Dinas	Sekretaris	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	1 tahun	Website
B	INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN/ATAU KEBIJAKAN							
1	Dokumen pendukung	Dokumen pendukung dapat berupa surat-surat terkait penyusunan, absensi peserta penyusunan dan lain-lain	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Unit Kerja Terkait
2	Masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk	Berita acara atau informasi lain yang berisi masukan terkait peraturan, keputusan, kebijakan yang dibentuk	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Unit Kerja Terkait
3	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	Notulen rapat/pertemuan terkait	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile	5 tahun	Unit Kerja Terkait
4	Rancangan peraturan	Berisi rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile	5 tahun	Website dan Unit Kerja Terkait
5	Tahapan perumusan peraturan	Alur tahapan dalam perumusan peraturan	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile	5 tahun	Unit Kerja Terkait
6	Peraturan yang diterbitkan	Berisi peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Website dan Unit Kerja Terkait
C	INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN							
1	Pedoman pengelolaan organisasi administrasi dan keuangan	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja	Kepala Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dinas Dan Badan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah						
2	Profil Pegawai	Ringkasan jumlah, sebaran jenis kelamin dan tingkat pendidikan pegawai	Kepala Dinas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Website
3	Anggaran Badan Publik	Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB)	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Website
4	Data Statistik	Data Pokok dan Data Fungsi Pertanian dan Peternakan	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Website
D LAIN LAIN								
1	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Dokumen terkait perjanjian dengan pihak ketiga	Kepala Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	1 tahun	Unit Kerja Terkait
2	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya	Surat-surat terkait	Kepala Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	1 tahun	Unit Kerja Terkait
3	Persyaratan Perizinan	Tata cara mendapatkan perizinan	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile	Selama berlaku	Unit Kerja Terkait
4	Perbendaharaan dan Inventaris	Aset dan inventaris	Kepala Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Website
5	Rencana Strategis	Rencana Strategis Terbaru	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website
6	Rencana Kerja	Rencana Kerja Terbaru	Kepala Dinas	Kasubbag Program	Awal tahun	Softfile dan Hardcopy	5 tahun	Website
7	Agenda kerja pimpinan Badan Publik	Agenda kegiatan Kepala Dinas	Sekretaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bulanan	Softfile	1 tahun	Website
8	Informasi Pelanggaran dan Pengawasan Internal	Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan dan/atau Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Kepala Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian & Kasubbag Program	Tentatif	Softfile	5 tahun	Website
9	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan	Artikel/Penelitian terkait	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile	5 tahun	Website
10	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik	Berita atau notulen khusus terkait	Kepala Dinas	Unit Kerja Terkait	Tentatif	Softfile	5 tahun	Website

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dalam pertemuan yang terbuka untuk umum							
INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA-MERTA								
1	SOP Safety Briefing Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Keadaan Darurat	Berisi tata cara mengenai penanganan bencana di lingkup kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
2	SOP Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas	Berisi tata cara mengenai penanganan permohonan informasi disabilitas	Kepala Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Arsip
3	Informasi tentang Antisipasi Musim Kemarau/Hujan, Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Potensi Serangan OPT	Berisi informasi tentang prakiraan jatuhnya musim hujan/kemarau, potensi serangan OPT serta DPI nya di beberapa wilayah, dan langkah antisipasi dampaknya	Kepala Balai Pelindungan Tanaman	Balai Pelindungan Tanaman Provinsi Jawa Tengah	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	1 tahun	Cetak, sosial media, website
4	Kontak Pelayanan Unit Respon Cepat Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Informasi terkait kontak Pelayanan Unit Respon Cepat Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Kepala Bidang Veteriner/Pejabat Otoritas Veteriner	Bidang Veteriner	Tentatif	Softfile dan Hardcopy	Selama berlaku	Website dan Unit Kerja Terkait

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 46

TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan setiap tahun;

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi, Pengecualian Informasi Publik yang bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2010);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Mei 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan
Pernakanan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 46 Tahun 2026
Tanggal : 1 Mei 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	JUDUL INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Data hasil uji laboratorium produsen dan pengedar benih dalam proses sertifikasi (sebelum sertifikat terbit) serta data hasil uji laboratorium produsen benih yang tidak lolos sertifikasi.	a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i.	Apabila informasi dibuka: Pada tahap proses sertifikasi (sebelum sertifikat terbit): - Berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru karena data belum final; - Mengganggu independensi dan objektivitas proses evaluasi teknis oleh lembaga berwenang; - Dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk mempengaruhi proses atau merugikan posisi kompetitif produsen. Pada hasil uji yang tidak lolos sertifikasi (pasca proses): - Berpotensi menimbulkan kerugian reputasi dan ekonomi yang tidak proporsional bagi produsen; - Membuka peluang eksploitasi informasi oleh pesaing untuk tujuan menjatuhkan usaha; - Dapat memicu persaingan usaha tidak sehat.	- Menimbulkan kesalahpahaman masyarakat karena penyebaran informasi yang belum final; - Menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi produsen, khususnya yang tidak lolos sertifikasi; - Meningkatnya risiko persaingan usaha tidak sehat, termasuk praktik menjatuhkan pesaing berbasis informasi yang belum tentu relevan secara komersial; - Potensi menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi.	- Menjaga proses tetap objektif dan terpercaya; - Melindungi kepentingan nama baik produsen; - Menjaga persaingan usaha tetap sehat.	- Selama proses sertifikasi berlangsung, maksimal 8 bulan tergantung komoditas dan jenis varietas; - Setelah proses sertifikasi selesai, informasi hasil uji laboratorium tetap dikecualikan khusus untuk produk yang tidak lolos sertifikasi, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari produsen yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pembukaan.
2	Data produsen benih (kecuali nama produsen, alamat produsen, stok produksi dan varietas kelas benih) yang memuat informasi internal usaha dan/atau data pribadi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	- Melanggar perlindungan data pribadi; - Memicu persaingan usaha yang tidak sehat.	- Meningkatkan risiko data pribadi; - Meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat.	- Melindungi data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Melindungi kepentingan	Dapat dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau dalam proses penyidikan atau atas perintah pengadilan atau putusan Komisi Informasi.

Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
3	Data Laporan Hasil Pengujian laboratorium pada uji : a. Kesehatan Hewan; b. Kesehatan Masyarakat Veteriner; c. Semen yang diajukan oleh mitra atau pelanggan; d. Pakan dan Bahan Pakan.	c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data Pribadi. a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23; c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data Pribadi.	• Melanggar perlindungan data pribadi; • Memicu persaingan usaha yang tidak sehat.	• Meningkatkan risiko penyalahgunaan pribadi; • Meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat;	• Melindungi data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Melindungi kepentingan ekonomi pelaku usaha; • Menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.	Dapat dibuka dalam proses penyidikan atau atas perintah pengadilan atau putusan Komisi Informasi atau yang berwenang.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES